

Analisis fakta yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak pertambahan nilai atas diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali pada perusahaan pembiayaan studi dari sudut pandang manajemen sengketa pajak = Analysis of facts underlying judge's verdict in resolving dispute of value added tax on insurance discounts and sale of repossessed goods at finance company study of tax dispute management perspective

Indra Himawan Adlan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20429674&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan pembiayaan terkait perkara diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Transaksi diskon asuransi terutang PPN pada skema transaksi pembiayaan konsumen sedangkan transaksi penjualan barang yang ditarik kembali dapat terutang PPN pada transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Sengketa ini disebabkan perbedaan interpretasi hukum sehingga memerlukan manajemen sengketa pajak berupa pembentukan aturan baru atau revisi aturan menggunakan peraturan yang sifatnya mengikat ke luar seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

.....This thesis discusses facts which underpin the Judge's verdict in Value Added Tax (VAT) disputes on matters related to finance company insurance discounts and sale of repossessed goods. It uses descriptive qualitative approach. VAT is levied on insurance discount in consumer financing transaction scheme, while VAT on the sale of repossessed goods can be levied in a finance lease transaction. These tax disputes are caused by different legal interpretation, thus it needs tax dispute management by forming a new rule or amendment of the existing rules using the rules which have legal binding force to the society such as Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, and Peraturan Direktur Jenderal Pajak